

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MAMUJU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Untuk mencapai derajat sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

MUH. TAUFIQ JAENUDDIN

E 121 14 504

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

LEMBARAN PENGESAHAN
SKRIPSI
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MAMUJU

Disusun dan diajukan oleh

MUH. TAUFIQ JAENUDDIN
E 121 14 504

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2018
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Rabinah Yunus, M.Si.
NIP. 19640727 199103 1 001

Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP. M.Si.
NIP. 19680411 200012 001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik
dan Pemerintahan FISIP Unhas



Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 198903 1027

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unhas



Dr. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630912 198702 2001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MAMUJU**

Yang Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

MUH. TAUFIQ JAENUDDIN

E12114504

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, pada Hari Selasa, Tanggal 14 Agustus 2018

Menyetujui

PANITIA UJIAN

KETUA : Prof. Dr. Hj. Rabinah Yunus, M.Si

Sekretaris : Haryanto, S.IP. MA.

Anggota : Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si

Anggota : Rahmatullah, S.IP, M.Si

Anggota : A. Lukman Invan, S.IP, M.Si

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Rabinah Yunus, M.Si

Pembimbing II: Rahmatullah, S.IP, M.Si



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan limpah kasih setiaNya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan kasih dan penyertaannyalah sehingga penulis mampu mengatasi setiap masalah dalam proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju”**. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Proses penulisan skripsi ini berawal dari proposal penelitian hingga pengolahan data melalui usaha keras dan giat dan banyak melibatkan pihak yang sangat memberi andil besar pada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua, ibunda **DRA. Farida** dan ayahanda **DRS. Jaenuddin** yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya baik itu dukungan moral maupun secara financial dalam kelancaran studi penulis. Terima kasih atas jasa-jasa dalam perjuangannya mendidik dan membesarkan penulis. Berkat kekuatan doa yang setiap saat beliau panjatkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan. Semoga mereka diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.

Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A., sebagai Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si. Selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh stafnya.
4. Ibu Dr. Nurlinah, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pemerintahan FISIP UNHAS.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M. Si selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Rahmatullah, S,IP, M, Si selaku pembimbing II dan sebagai Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan arahan, saran serta kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada para penguji penulis mulai dari ujian proposal hingga ujian skripsi, Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si, Bapak A. Lukman Irwan, S.IP. M. Si dan Bapak Haryanto, S.IP. MA, terima kasih atas masukan dan arahnya kepada penulis.
8. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas.
9. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya. Staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
9. Kepada seluruh staf pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Terima Kasih telah memberikan waktu dan informasi yang penulis butuhkan.
10. Kepada saudara-saudara saya tercinta terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang selalu kalian berikan selama ini.
11. Kepada keluarga besar penulis Terima Kasih senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dijenjang strata 1 di Universitas Hasanuddin.

12. Kepada teman-teman seperjuangan saya Fidelitas terima kasih untuk semua dukungan dan doanya.
13. Kepada saudara tak sedarah saya yang tergabung dalam grup PARALEL yang senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka, Saharuddin, S.IP, Nurul Fitri F. Hamka, S.IP, Febry Ardely, S.IP, Eko Aryono, S.IP, Pratiwi Puji Lestari H, S.IP serta calon-calon S.IP lainnya AL, Kakak Tua, Mamir, Ota', Dirga, Andi dan Afdal, Terima kasi jalan-jalannya, Nongki-nongki tidak jelasnya, dan terima kasih Bullyannya. Terima untuk kalian yang selalu membukakan pintu kamar ketika saya butuh pelarian dan terima kasih karena tidak pernah membuat saya menangis sendiri. Terima Kasih telah memberikan momen-momen indah selama berada di Universitas Hasanuddin. Sayang ki' gaes.
14. Teman-teman KKN Gelombang 96 Kecamatan Camba yang telah menjadi teman baru saya selama menjalani KKN kurang lebih 2 bulan. Terima kasih untuk momen suka duka yang telah kita ciptakan selama di Tiroang.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Adanya partisipasi yang telah diberikan oleh pihak tersebut di atas, penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Allah SWT dapat membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda, semoga Damai Sejahtera menyertai kita semua.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT , karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!

Sekian dan terimakasih.

Makassar, 12 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6

1.4	Manfaat Penelitian	7
-----	--------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Konsep Pariwisata dan Kepariwisataaan.....	8
2.1.1	Pariwisata.....	8
2.1.2	Jenis-Jenis Pariwisata.....	12
2.1.3	Daya Tarik Wisata	16
2.1.4	Kepariwisataaan	24
2.1.5	Pengembangan Kepariwisataaan	28
2.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
2.2.1	Pajak Daerah	35
2.2.2	Objek dan Subyek Pajak Daerah.....	39
2.2.3	Retribusi Daerah.....	40
2.2.4	Kriteria Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Khusus.....	41
3.2	Kerangka Konseptual	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.2	Tipe Penelitian.....	47
3.3	Jenis data Penelitian	47
3.3.1	Data Primer.....	47
3.3.2	Data Sekuder	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data	48
3.4.1	Wawancara Mendalam.....	48
3.4.2	Dokumen dan Arsip.....	49

3.4.3	Informan Penelitian.....	49
3.5	Definisi Operasional.....	50
3.6	Teknik Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Mamuju.....	52
4.1.1	Sejarah Kabupaten Mamju.....	52
4.1.2	Letak Geografis.....	57
4.1.3	Kependudukan	57
4.1.4	Pemerintahan.....	58
4.2	Gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju.....	68
4.2.1	Realisasi PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju.....	69
4.2.2	Data Wisatawan.....	72
4.3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Mamuju.....	75
4.3.1	Meningkatkan Promosi Wisata Daerah.....	75
4.3.2	Mengembangkan Wisata Produktif Berbasis Lingkungan	81
4.3.3	Menumbuhkan Peran Aktif Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Membangun Sektor Pariwisata.....	83
4.3.4	Meningkatkan Peran Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Mamuju.....	85
4.4	Faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di	

Kabupaten Mamuju.....	93
4.5.1 Faktor Pendukung.....	93
4.5.2 Faktor Penghambat.....	95

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA.....	106
---------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015, 2016 dan 2017.....	2
Tabel 2 Data Tentang Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju.....	4
Tabel 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju pada tahun 2015, 2016 dan 2017.....	68
Tabel 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015.....	69
Tabel 5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2016.....	70
Tabel 6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2017.....	71
Tabel 7 Data tentang kunjungan Wisatawan terhadap tiga Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015.....	72
Tabel 8 Data tentang kunjungan Wisatawan terhadap tiga Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2016.....	73
Tabel 9 Data tentang kunjungan Wisatawan terhadap tiga Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2017.....	74
Tabel 10 Data tentang Daya Tarik Wisata yang dipromosikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.....	76
Tabel 11 Data tentang Event dan Festival yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju	

pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.....	78
Tabel 12 Data tentang status pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju 2018.....	87
Tabel 13 Sumber Dana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015,2016 dan 2017.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	46
Gambar 2 Bagan Struktur Kedinasan.....	67

INTISARI

MUH TAUFIQ JAENUDDIN. E12114504. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MAMUJU. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. 2018.

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju, Serta Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Mamuju.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, observasi, dan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan pariwisata mulai dari mempromosikan Daya Tarik Wisata, melaksanakan Event dan Festival, melaksanakan gerakan kelompok sadar wisata, menjalankan program Desa Wisata, melakukan sosialisasi peningkatan sumber daya manusia baik dilingkungan pemerintah yang terkait maupun masyarakat dan mengupayakan adanya bentuk kerjasama dengan pihak masyarakat pengelola Daya Tarik Wisata. Kedua, faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju adalah faktor pendukung yaitu letak daerah yang strategis dan adanya fasilitas penunjang pariwisata, faktor penghambat yaitu masalah kebijakan, kurangnya anggaran sedangkan keuangan, promosi Daya Tarik Wisata belum maksimal, pengelolaan Daya Tarik Wisata belum serius, sumber daya

manusia yang masih terbatas dalam lingkup pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan tidak ada kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta.

Kata kunci : Upaya, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata.

ABSTRACT

MUH TAUFIQ JAENUDDIN. E12114504. THE EFFORTS INCREASED REVENUE OF THE ORIGINAL AREA THROUGH THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN MAMUJU REGENCY. Essay. Government Studies Program. Department of Political Science and Governmental Science. Faculty of Social Science and Political Science. Hasanuddin University. 2018.

This study aims to describe the efforts of the tourism development conducted by the Tourism Office of Mamuju Regency in increasing Income of the original area (PAD) in the Mamuju Regency, as well as to explain the factors that affect the development of tourism in boosting PAD in Mamuju Regency.

The research method used is qualitative method with descriptive type. Data collection using literature study techniques, and interviews. Furthermore, the data are analyzed qualitatively.

The results of this research show that the efforts made, the first Department of culture and tourism has not been fullest Mamuju Regency in increasing Income of the original area (PAD) through the development of tourism, ranging from promoting tourist attraction, implement the Event and Festival, carry out movements of groups conscious tourism, Tourist Villages, running the program do the increased socialization of human resources both Government related surroundings as well as the community and maintains a presence form cooperation with the Community Manager tourist attraction. Second, the factors that affect Indigenous Areas increased revenue through the development of tourism in Mamuju Regency is a supporting factor, namely the location of the strategic areas and the existence of supporting facilities for tourism, i.e. restricting factors of policy issues, the lack of a budget while the finance, the promotion of the tourist attraction has not been fullest, management of tourist attraction has not been serious, human resources are still limited in scope local governments or community around tourist attraction and there is no local government cooperation with private parties.

Key words: Effort, an increase in Income of the original area, tourism.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kepariwisata di daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah yang terkait dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Bahkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan.

Salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata daerah Kabupaten Mamuju didukung Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam dan lingkungan, memperkuat jati diri bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air. Kemudian Sebagaimana yang tertulis dalam

Peraturan daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 dijelaskan bahwa, salah satu tujuan dan sasaran misi Kabupaten Mamuju adalah menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai daerah pengembangan pariwisata dan budaya.

Di Kabupaten Mamuju itu sendiri, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dari sektor pariwisata masih belum maksimal. Pada sektor pariwisata hanya mampu menyumbang sekitar 50% dari target yang telah direncanakan mulai dari tahun 2015 sampai 2017.

TABEL 1

Data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015, 2016 dan 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI PAD	%
1	2015	150.000.000,00	76.425.000,00	50,95
2	2016	150.000.000,00	80.125.000,00	53,42
3	2017	150.000.000,00	81.200.000,00	54,13

(Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran umum keuangan daerah yang mencakup unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Namun sampai saat ini upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju masih mengalami berbagai macam kendala seperti, fasilitas Daya Tarik Wisata yang kurang baik, belum dilakukannya pemanfaatan informasi Daya Tarik Wisata berbasis internet, belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

(RIPPDA), peran masyarakat kurang aktif dalam membantu pengembangan pariwisata dan masalah-masalah lainnya. Kabupaten Mamuju memiliki beberapa kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah obyek tujuan wisata sebagai berikut.

TABEL 2

Data Tentang Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju

NO	WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA BUATAN
1	Pulau Karampuang	Rumah Adat Mamuju	Anjungan Pantai Manakarra
2	Permandian So'do	Museum Kabupaten Mamuju	Anjoro Pitu
3	Bone Tangnga		Gentungan
4	Air Terjun Tamasapi		
5	Pantai Mangrove Bebanga		
6	Air Terjun Botteng		

7	Goa Saletto		
8	Pantai Pasir Putih Ngalo		
9	Pantai Lombang-lombang		
10	Air Panas Passiangan		

Selain Daya Tarik Wisata yang diterangkan di atas, masih banyak Daya Tarik Wisata potensial lainnya yang dapat dikelola untuk menjadi daerah tujuan wisata di Kabupaten Mamuju. Namun kenyataannya beberapa potensi-potensi Daya Tarik Wisata yang ada masih belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju. Seperti Daya Tarik Wisata Pulau Karampuang yang belum terlalu ditata dengan rapi, akses menuju pulauanya masih ditangani oleh masyarakat yang memiliki perahu mesin, Museum Kabupaten Mamuju yang berada dalam lingkungan Rumah Adat Mamuju yang selalu sepi pengunjung karena kekurangan benda-benda bersejarah dan Permandian So'do yang sampai saat ini akses jalan menuju sungainya masih kurang baik.

Melihat dari hal tersebut, sektor pariwisata yang berada di Kabupaten Mamuju perlu mendapatkan sorotan. Masih banyak kendala dan kekurangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dalam pengembangan sektor pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu perlu diketahui apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Mamuju dan apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju. Sehingga potensi-potensi pariwisata yang ada di daerah Kabupaten Mamuju dapat dikelola dengan baik guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mensejahterakan masyarakat daerah dan menunjang pembangunan yang ada di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Mamuju”**. Adapun sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pulau Karampuang, Permandian So'do dan Rumah Adat Mamuju.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan upaya-upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Mamuju.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademik, memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait, mengenai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang dimana tinjauan pustaka ini sebagai tolak ukur atau landasan berfikir untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis akan mengemukakan teori, konsep, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

2.1 Konsep Pariwisata dan Kepariwisataan

2.1.1 Pariwisata

Secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu :

- a. Pari yang berarti berulang-ulang atau berkali-kali.
- b. Wisata yang berarti perjalanan atau bepergian.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, dikatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Chirstie Mill dan Marrison dalam Yoeti (2008) mengatakan bahwa pariwisata merupakan gejala atau fenomena yang sukar dijelaskan. Bisa salah dalam mengartikan industri pariwisata sebagaimana industri, dimana tempat

mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, karena ide sebenarnya untuk memberikan satu kesatuan ide tentang pariwisata itu, Sehingga dengan demikian kesannya dapat dilihat dari sudut pandang politis dan ekonomis.

Untuk dapat mengerti lebih lanjut tentang pengertian pariwisata, penulis menyediakan bahan pertimbangan yang dikumpulkan dari definisi-definisi para ahli agar lebih memudahkan dalam menginterpretasi pariwisata.

Menurut pandangan para ahli mengenai definisi pariwisata, adalah sebagai berikut.

- a. Menurut A. Yoeti dalam bukunya “Pengantar Ilmu Pariwisata” (1985) pariwisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.
- b. Menurut Prof. Salah Wahab dalam Oka A. Yoeti (2008), pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar, yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara maupun luar negeri, meliputi kediaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.
- c. World Tourism Organization (UNWTO) sebuah organisasi pariwisata dunia mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang diluar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut.

- d. Profesor Hunziger dan Krapf dari Swis dalam buku *Grundriss der Allegemeinen Fremdenverkehrslehre* mendefinisikan pariwisata sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting (a major activity) yang memberi keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.
- e. E. Guyer Freuler (Yoeti, 1982 : 105) memberikan batasan pengertian pariwisata. Dalam artian modern, ia mengatakan bahwa pariwisata merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari pada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan dari pada alat-alat pengangkutan.
- f. Menurut Kurt Morgenroth pariwisata dalam arti sempit adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat diambil suatu pengertian pariwisata yaitu suatu perjalanan yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok di luar tempat tinggalnya dan lingkungannya

dalam jangka waktu yang sementara bukan untuk keperluan pekerjaan melainkan untuk mencapai kepuasan yang beraneka ragam.

Dari berbagai pendapat tentang pariwisata yang dikemukakan oleh para ahli diatas, terdapat beberapa faktor penting yang ada dalam batasan suatu definisi mengenai pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Perjalanan dilakukan untuk sementara waktu.
- b. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- c. Orang yang melakukan perjalanan tersebut harus mampu dari segi jasmani maupun finansial.
- d. Tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.
- e. Perjalanan yang dilakukan harus berkaitan dengan bertamasya dan rekreasi.

2.1.2 Jenis-Jenis Pariwisata

Nyoman S. Pendit, dalam buku "Potensi Pariwisata" (2006 : 37-43), Pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut.

a. Wisata Budaya

Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri untuk mengetahui keadaan rakyat di suatu wilayah, mengetahui kebiasaan atau adat istiadat, cara hidup, serta mempelajari budaya dan keseniannya. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni

music dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

b. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini terkait dengan olahraga di air, danau, pantai, teluk atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air serta rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah atau Negara maritime seperti di Laut Karibia, Hawaii, Indonesia dan sebagainya. Di Indonesia banyak tempat dan daerah yang memiliki potensi wisata maritim ini, seperti misalnya pulau-pulau Seeribu di teluk Jakarta, Danau Toba, Pantai pulau Bali dan sebagainya.

c. Wisata Cagar Alam

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

d. Wisata MICE

Menurut Nyoman S. Pendit (1999 : 25), Mice diartikan sebagai wisata konvensi, dengan batasan berupa usaha jasa konvensi, perjalanan intensif

dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan lain sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

e. Wisata Agro

Yaitu perjalanan yang dilakukan untuk memahami kehidupan nyata tentang pertanian dan memberikan pemahaman secara langsung bahwa kehidupan bertani adalah pekerjaan yang sangat mulia karena kehidupan manusia lainnya sangat bergantung pada pertanian.

f. Wisata Buru

Jenis ini banyak dilakukan di Negara yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang legal dan dibenarkan oleh pemerintah. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan.

g. Wisata Ziarah

Jenis wisata ini sering dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh individu atau kelompok ke tempat-tempat suci seperti tempat ibadah, makam-makam para raja atau pemimpin yang terkenal, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, sumur atau sungai yang memiliki legenda atau mengandung unsur cerita rakyat. Wisata ziarah ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan lain sebagainya.

Pengembangan itu sendiri tidak lepas dari suatu upaya atau usaha pengembangan dari objek yang sudah dibangun. Karenanya pengembangan akan dapat dimengerti apabila kita memahami arti dari pembangunan itu sendiri.

Menurut Yoeti (1996 : 303) ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan, yaitu:

- a. Tersedianya obyek dan daya tarik wisata.
- b. Tersedianya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata.
- c. Tersedianya fasilitas adminities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata, harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Daerah itu mempunyai daya tarik yang berbeda dengan daerah lainnya, baik objek wisata maupun atraksi wisata apabila orang datang ke sana.
- b. Di daerah tersebut harus tersedia fasilitas rekreasi dan fasilitas lain yang dapat membuat wisatawan betah di tempat tujuan wisata.
- c. Di daerah tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang cinderamata dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal wisatawan.
- d. Di daerah tersebut tersedia fasilitas umum seperti tempat ibadah, tempat makan dan minum, tempat buang air, tempat parker kendaraan serta jalanan yang memadai dalam menghubungkan tempat wisata dengan tempat-tempat lainnya.

Syarat-syarat ini tentunya apabila dapat terpenuhi maka akan menjadi daya tarik wisata bagi pengunjung di daerah maupun luar daerah.

2.1.3 Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata pada awal perkembangan pariwisata di Indonesia adalah untuk mengistilahkan objek wisata, namun setelah Peraturan Pemerintah (PP) pada tahun 2009 di terbitkan, kata objek wisata selanjutnya tidak digunakan lagi untuk menyebut kata objek wisata yang merupakan daerah tujuan para wisatawan.

Untuk memahami pengertian dan makna dari kata daya tarik wisata tersebut, berikut dijabarkan pengertian daya tarik wisata dari beberapa sumber sebagai berikut.

- a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan.
- b. Menurut Yoeti (2006 : 164), menyatakan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.
- c. Menurut Nyoman S. Pendit (2003 : 35), mengatakan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menarik dan mempunyai nilai untuk dikunjungi dan dilihat.

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan di atas tentang daya tarik wisata, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan daya tarik wisata adalah segala sesuatu disuatu tempat yang memiliki keunikan, keindahan, kemudahan dan nilai yang berwujud keanekaragaman kekayaan alam maupun buatan manusia yang menarik dan mempunyai nilai untuk dikunjungi dan dilihat oleh wisatawan.

Pada dasarnya, daya tarik wisata dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni daya tarik wisata alamiah dan daya tarik wisata buatan. Daya tarik wisata alamiah adalah daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yg terdiri dari keadaan alam, flora dan fauna. Sedangkan daya tarik wisata buatan merupakan hasil karya manusia yang terdiri dari museum, peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan kompleks hiburan. Menurut Nyoman S. Pendit (2003), menyatakan bahwa terdapat daya tarik wisata lainnya yakni minat khusus yang merupakan suatu hal yang menjadi daya tarik wisata sesuai dengan minat dari wisatawannya seperti berburu, mendaki gunung, menyusuri gua, industry dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah dan lain sebagainya.

Lebih lanjut tentang faktor-faktor yang dapat menjadi daya tarik wisata, menurut pitana dan gayatri, (2005 : 56) mengidentifikasi terdapat 10 faktor yang menjadi faktor penarik suatu daerah menjadi daya tarik wisata, yaitu (1) iklim suatu daerah, (2) gencarnya usaha promosi, (3) produk barang maupun jasa pada suatu daerah, (4) even-even khusus, (5) insentif potongan harga dan

sejenis, (6) ajakan teman, (7) mengunjungi kerabat dan teman, (8) daya tarik wisata, (9) budaya dan (10) lingkungan alamiah maupun buatan manusia.

Suatu daya tarik wisata pada prinsipnya harus memenuhi tiga persyaratan, yakni:

- a. *Objek wisata tersebut harus memiliki apa yang disebut dengan “Something to see”* (ada yang dilihat), maksudnya harus mempunyai daya tarik khusus, disamping itu juga harus memiliki atraksi wisata yang dapat menghibur bila orang berkunjung ke sana.
- b. Selanjutnya harus mempunyai *“Something to do”* (ada yang dikerjakan), selain banyak yang dapat dilihat, suatu objek atau daya tarik wisata harus memiliki fasilitas yang dapat digunakan agar pengunjung betah tinggal lebih lama.
- c. Kemudian harus ada *“Something to buy”* (ada yang dapat dibeli atau souvenir) terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan yang dibuat rakyat setempat sebagai oleh-oleh atau cenderamata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing.

Objek atau daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan jenisnya, yakni sebagai berikut :

- a. Objek wisata alam : laut, pantai, gunung, danau, flora, fauna, kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam.
- b. Objek wisata budaya : upacara kelahiran, tari-tari tradisional, pakaian adat, perkawinan adat, upacara laut, upacara turun sawah, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun

tradisional, tekstil lokal, pertunjukan tradisional, adat-istiadat lokal, museum dan lain sebagainya.

- c. Objek wisata buatan : sarana dan fasilitas olahraga, permainan (laying-layang), hiburan (lawak, akrobatik), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain sebagainya.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia memiliki program yang disebut sapta pesona. Terkait dengan hal itu maka daya tarik wisata di Indonesia maupun di daerah pada dasarnya ditentukan oleh keberhasilan dalam perwujudan sapta pesona daerah tersebut. Sapta pesona adalah unsur yang penting dalam mengembangkan objek wisata dan merupakan dasar prinsip dalam pengembangan pariwisata di Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Unsur-unsur sapta pesona tersebut adalah :

- a. Keamanan

Kondisi yang memiliki makna menciptakan lingkungan yang aman bagi wisatawan dan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan. Sehingga wisatawan merasa aman, tenang, tidak takut, terlindungi dan dapat menikmati kunjungannya ke suatu destinasi wisata.

Kondisi ini dapat tercerminkan apabila tercipta keadaan seperti aman dari gangguan masyarakat seperti pedagang-pedagang yang memaksa wisatawan untuk membeli, aman dari tindakan kejahatan, aman dari penyakit menular maupun berbahaya, aman dari kecelakaan yang disebabkan oleh

alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik. Jadi, aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik termasuk barang milik wisatawan.

b. Ketertiban

Kondisi yang memiliki makna menciptakan lingkungan yang tertib bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan teratur dan efektif bagi wisatawan. Kondisi ini dapat terwujud dari suasana yang teratur, rapi, lancar dan menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan masyarakat.

c. Kebersihan

Kondisi yang memiliki makna menciptakan lingkungan yang bersih bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan higienis bagi wisatawan. Lingkungan yang bersih baik di rumah sendiri maupun di tempat-tempat umum, seperti di hotel, restoran, penginapan, angkutan umum, tempat rekreasi, tempat buang air dan lain sebagainya.

d. Kesejukan

Kondisi yang memiliki makna menciptakan lingkungan yang nyaman bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana nyaman, rapi, tenang dan rasa betah bagi wisatawan, sehingga mendorong wisatawan untuk lama tinggal dan minat kunjungan yang berkelanjutan.

e. Keindahan

Kondisi yang memiliki makna menciptakan lingkungan yang indah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang menarik dan menumbuhkan kesan yang mendalam bagi wisatawan,

sehingga mendorong promosi ke kalangan atau pasar yang lebih luas dan potensi untuk melakukan kunjungan ulang.

Keindahan suatu lingkungan dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi tata warna, tata letak, tata ruang ataupun gaya dan gerak yang serasi dan selaras. Sehingga memberi kesan yang indah dan memberikan rasa keingintahuan tentang hal tersebut semakin terus bertambah.

f. Keramahan

Kondisi yang memiliki makna menciptakan lingkungan yang ramah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang akrab, bersahabat serta seperti “rumah sendiri” bagi wisatawan. Sehingga mendorong minat kunjungan berkelanjutan dan promosi yang positif bagi daya tarik wisata di daerah ke kalangan atau pasar yang lebih luas.

g. Kenangan

Kondisi yang memiliki makna menciptakan memori atau ingatan yang berkesan menyenangkan dan akan selalu diingat oleh wisatawan. Sehingga pengalaman perjalanan wisata yang dilakukan dapat terus membekas dalam benak hati wisatawan dan menumbuhkan motivasi untuk melakukan kunjungan kembali. Kondisi ini dapat tercerminkan apabila tercipta keadaan seperti makanan dan minuman yang enak dengan penyajian yang menarik, kebudayaan dan kesenian yang khas dan mempesona, cenderamata khas daerah yang unik serta menarik dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan sapta pesona tersebut maka pemerintah perlu melakukan kebijakan guna untuk memberikan pengertian kepada semua lapisan masyarakat dan dunia usaha, bahwa sapta pesona merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan suatu objek wisata dalam daerah. Dalam mengembangkan daya tarik wisata di daerah maka diperlukan interaksi yang harmonis antara masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah guna untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di daerah. Menurut Yoeti (1982), potensi pariwisata dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Potensi Alam

Potensi alam adalah keadaan serta jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, sungai, bukit, lembah dan lain-lain (keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitar maka akan menarik minat wisatawan untuk melakukan kunjungan dan berpotensi mendorong wisatawan untuk melakukan perjalanan ulang.

b. Potensi Kebudayaan

Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah.

c. Potensi Manusia

Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan atau pertunjukan tarian dan seni budaya suatu daerah.

2.1.4 Kepariwisataan

Pengertian kepariwisataan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yaitu kepariwisataan, adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi secara multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Menurut Nyoeman S. Pendit (2003 : 3) menjelaskan kepariwisataan sebagai upaya memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya. Yang semuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi Negara yang telah berkembang atau maju dalam aspek perekonomian, dimana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah industri lainnya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat diambil suatu pengertian kepariwisataan yaitu Mencakup orang-orang yang melakukan perjalanan keluar dari tempat tinggalnya untuk melakukan Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan fasilitas dan perekonomian

pariwisata di suatu daerah sebagai wujud dari kebutuhan setiap orang dan Negara.

Dalam dunia Kepariwisataan istilah tourist bukanlah hal yang asing, di Indonesia istilah tourist itu sendiri lebih dikenal dengan sebutan wisatawan. Wisatawan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Jadi menurut pengertian tersebut, semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Menurut Yoeti (2003) syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila:

- a. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, di luar tempat kediaman orang tersebut tinggal.
- b. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang dan tidak mencari nafkah di tempat atau Negara yang dikunjunginya.
- c. S semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.

Menurut Smith (dalam Pitana dan Gayatri, 2005, hlm. 53) wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja atau sedang berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda.

Menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO) wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu Negara di luar tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, di dorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk Negara yang dikunjungi.

Menurut G.A. Schmoll wisatawan merupakan individu atau kelompok yang merencanakan kemampuan daya beli yang dimilikinya untuk melakukan perjalanan dengan tujuan rekreasi dan hiburan.

Menurut Cohen (1974) wisatawan adalah seorang pelancong yang melakukan perjalanan atas kemauan sendiri dan untuk waktu sementara saja, dengan harapan mendapatkan kenikmatan dari hal-hal baru dan perubahan yang dialami selama dalam perjalanan yang relative lama.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, maka dapat diambil suatu pengertian wisatawan yaitu, setiap orang yang melakukan perjalanan antar Negara maupun daerah dengan tujuan untuk bersenang-senang dan tidak bekerja untuk mencari nafkah. Ciri utama wisatawan yaitu:

- a. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat atau daerah dan tinggal diberbagai tempat tujuan.
- b. Tempat tujuan wisatawan berbeda dari tempat dimana ia tinggal dan tempat kerjanya sehari-hari, karena itu kegiatan wisatawan tidak sama dengan kegiatan penduduk yang diam dan bekerja di tempat tujuan wisatawan.
- c. Wisatawan bermaksud pulang kembali dalam beberapa hari atau bulan karena perjalanannya bersifat sementara dan berjangka pendek.
- d. Wisatawan melakukan perjalanan bukan untuk mencari tempat tinggal atau menetap ditempat tujuan atau bekerja untuk mencari nafkah

2.1.5 Pengembangan Kepariwisataaan

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan kebudayaan sebagai salah satu dinas daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas sebagai unsur pelaksana daerah dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintah daerah di sektor pariwisata. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Daerah Kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekertari Daerah.

Desentralisasi adalah salah satu dari tiga asas pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi dalam suatu daerah. Terkait akan hal ini, maka perlu diketahui Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu asas yang harus dijalankan sebagai berikut.

1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Yang dimaksud dengan sebagian urusan adalah tidak semua urusan dapat diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti penyerahan urusan pertahanan dan keamanan akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintah pusat secara separatis.

2. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan kepada instansi vertikal di wilayahnya.

3. Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, koordinasi memiliki peran penting karena begitu banyaknya kita temui tumpang tindih pekerjaan. Oleh sebab itu dengan menjalankan koordinasi yang baik secara keseluruhan dapat disinkronisasikan demi tujuan dan kepentingan bersama. Menurut Georg R. Terry koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang dipimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konsep *Kybernology* modern karya Taliziduhu Ndraha pemerintahan berubah dari berobjek material Negara yang serba kekuasaan menjadi berobjek material masyarakat yang berkonotasi pelayanan, maka hubungan antara pemerintah dan masyarakat dari bagaimana cara mengontrol masyarakat dengan kekuasaan menjadi bagaimana harusnya yang dilakukan dan bagaimana baiknya dilakukan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Jadi dalam *Kybernology*, paradigm baru ilmu pemerintahan menitik beratkan bagaimana melayani masyarakat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal (1) dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Maka dalam menjalankan roda pembangunan sektor Pariwisata di Indonesia, koordinasi antara pihak pemerintah, masyarakat dan swasta sangat diperlukan dalam menciptakan pelayanan yang baik bagi wisatawan, mensejahterakan masyarakat, melestarikan lingkungan dan budaya serta manfaat lainnya.

Jika kita melihat koordinasi pembangunan pariwisata yang melibatkan pihak pemerintah, masyarakat dan swasta, maka pemerintah sebagai wakil rakyat selaku pemimpin daerah tentu memiliki peran yang penting sebagai pengarah kebijakan dalam mengatur masyarakatnya untuk turut serta berperan dalam pembangunan pariwisata. Sehingga pemerintah dengan segala kebijakannya diharapkan dapat menjalin hubungan baik antara masyarakat dan swasta tempat ia memerintah. Menurut G. U. Cleeton dan C. W. Mason (1934), pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memengaruhi orang-orang untuk mencapai hasil yang ingin dicapai bukan melalui penggunaan kekuasaan atau dengan paksaan. Sedangkan menurut Ordway Tead (1929), bahwa pemimpin diharapkan mampu mendorong pihak lain untuk menyelesaikan tugasnya. Maka dapat kita ambil pengertian bahwa pemerintah dalam kepemimpinannya harus dapat mendorong masyarakatnya untuk ikut bersama dalam pembangunan di daerahnya tanpa paksaan.

Dalam pembangunan Pariwisata di Indonesia tidak lepas dari hubungan lingkungan dan pemerintahan, salah satunya adalah TRI GATRA yang merupakan pengaruh ilmu-ilmu eksakta ekologi terhadap pemerintahan, yakni sebagai berikut.

a. Pengaruh Geografis

Faktor-faktor yang berdasarkan geografis, seperti perbatasan strategis (*strategic frontier*), desakan penduduk (*population pressure*), daerah kepulauan (*sphere of influence*) dan lain-lain, sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan.

Wilayah geografis memang sangat penting dalam pembangunan pariwisata. Misalnya Pulau Bali dan Hawaii yang memiliki letak geografis yang sempurna bagi banyak wisatawan yang menginginkan sebuah tempat berwisata yang eksotis, dengan pemandangan pulau yang indah dengan lautan yang dipenuhi ombak-ombak, atau di Negara yang terkenal dengan gunung fuji yang mendatangkan banyak wisatawan ke sana.

Maka dari itu, semua aspek potensi wilayah harus dapat diidentifikasi terutama faktor-faktor dominannya. Letak geografis suatu daerah juga dapat dirincikan lebih lanjut dalam sejumlah faktor yang cukup dominan, seperti menguasai perdagangan lalu lintas laut, darat dan udara. Sehingga dapat menarik banyak wisatawan dalam negeri maupun mancanegara untuk ke daerah tersebut.

b. Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dapat membuat suatu Negara ataupun daerah maju karena keahliannya, moralitas dan budaya penduduk suatu negeri. Dalam era modernisasi seperti sekarang ini, sumber daya manusia yang berkualitas dan professional merupakan kunci utama dalam pengembangan pariwisata. Maka dari itu, sumber daya manusia perlu diatur secara optimal sehingga kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada

benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan bisa menjadi aset organisasi pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan dengan matang, agar dapat memberikan manfaat positif bagi suatu daerah.

c. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam (SDA), mulai dari flora dan fauna yang dimiliki sampai pada hasil tambang, keindahan alam, serta sawah ladang yang dimiliki semuanya dapat dijadikan sebagai sumber potensi pariwisata. Sehingga pemerintah harus dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait sumber daya alam agar dapat terjaga dengan baik dan tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dari itu pengembangan pariwisata dengan tujuan melestarikan sumber daya alam sangat diperlukan dalam suatu daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka untuk dapat mengelola dengan optimal sumber daya manusia, sumber daya alam maupun kondisi geografis suatu daerah agar menjadi objek pariwisata, diperlukan perencanaan yang matang oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan swasta.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Dalam hal ini, meningkatkan pendapatan asli daerah diharapkan dapat memperkecil ketergantungan daerah dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil-hasil dari perusahaan daerah, pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha lainnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 157 tentang sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - a. Pajak daerah.
 - b. Retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penghasilan daerah yang sah

Berdasarkan sumber-sumber Pendapatan Daerah diatas, dalam penelitian ini dibatasi hanya pada sumber Pendapatan Daerah yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Daerah tingkat Provinsi dan Pajak Daerah Tingkat Kabupaten atau kota, yakni sebagai berikut :

a. Pajak Daerah Provinsi

Meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Adam Smith mengenai sifat dan prinsip pajak pada umumnya, sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah, setiap pajak harus memenuhi unsur Smith's Canons, yakni sebagai berikut.

a. Unsur Keadilan (equity)

Yang dimaksud *keadilan* dalam perpajakan ialah bahwa pajak harus adil secara vertikal maupun secara horizontal. Adil secara vertikal artinya pajak harus dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil di antara berbagai tingkat atau golongan pendapatan yang berbeda. Sedangkan adil secara horizontal artinya pajak dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil di antara berbagai sektor yang berbeda pada tingkat atau golongan pendapatan yang sama.

b. Unsur Kepastian (Certainty)

Yang dimaksud dengan unsur *kepastian* ialah bahwa pajak hendaknya dikenakan secara jelas, pasti dan tegas kepada setiap wajib pajak.

c. Unsur Kelayakan (Convenience)

Yang dimaksud dengan unsur *kelayakan* dalam memungut pajak daerah ialah bahwa wajib pajak harus dengan senang hati membayar pajak kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan para wajib pajak.

d. Unsur Efisien (Economy)

Yang dimaksud dengan unsur *efisien* ialah bahwa pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diterima pemerintah daerah.

e. Unsur Ketepatan (*adequacy*)

Yang dimaksud dengan unsur *ketetapan* ialah bahwa pajak tersebut dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai memperberat anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang bersangkutan.

Setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus memiliki landasan hukum yang berlaku. Landasan hukum ini merupakan dasar dari kebijaksanaan pemerintah daerah dalam memungut pajak di daerah. Dasar hukum sebagai landasan untuk memungut pajak adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

2.2.2 Objek dan Subyek Pajak Daerah

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, objek pajak daerah adalah kepemilikan, penguasaan, pengambilan, pemanfaatan, penerimaan penggunaan barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak daerah. Potensi daerah dapat dijadikan obyek pajak daerah apabila:

- a. Terletak pada wilayah suatu daerah, serta melayani masyarakat dalam wilayah tersebut.
- b. Objek Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat.
- d. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- e. Berpotensi tidak memberikan dampak negative, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan subjek pajak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan, subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang memiliki, menguasai, mengambil, memanfaatkan, menerima penyerahan dan menikmati obyek pajak daerah. Pada Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-Undang perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terhutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak.

2.2.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. Jadi dalam hal retribusi daerah, balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan di mana retribusi jalan tersebut dipungut. Juga retribusi pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pemakai tempat parkir.

Dalam melakukan pemungutan iuran retribusi daerah, harus menganut asas manfaat (*benefit principle*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang di terima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek jasa-jasa pelayanan diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Jasa Umum, yakni retribusi yang dikenakan atas jasa umum.
- b. Jasa Usaha, yakni retribusi yang dikenakan atas jasa usaha.
- c. Perizinan tertentu, yakni retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu.

2.2.4 Kriteria Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Khusus

a. Retribusi Jasa Umum

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan yakni:

- 1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
- 2) Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
- 3) Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup).
- 4) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional.

- 5) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 6) Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

b. Retribusi Jasa Usaha

Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Jasa tersebut harus bersifat komersial yang disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai
- 2) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

c. Retribusi Perizinan Khusus

Retribusi perijinan memiliki peran ganda sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih tepatnya retribusi perijinan, yakni dapat digunakan sebagai instrument untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, maupun untuk pengawasan di samping sebagai sumber pendapatan daerah.

Objek retribusi perizinan khusus adalah kegiatan pemberian ijin kepada kegiatan tertentu kepada orang pribadi atau instansi yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin tempat penjualan minuman beralkohol, ijin gangguan, ijin trayek dan ijin pengambilan hasil hutan.

2.3 Kerangka Konseptual

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

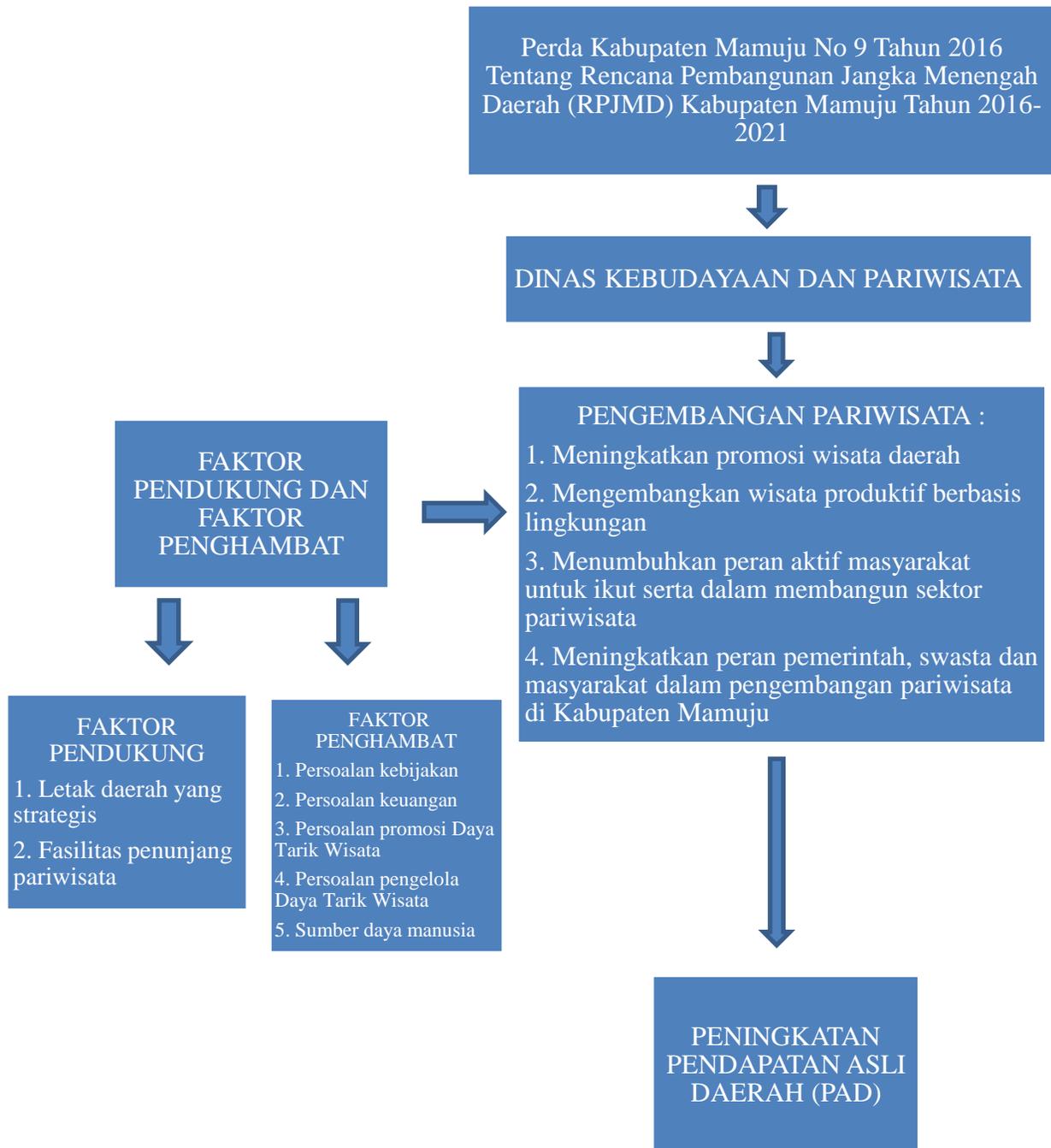
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekertaris Daerah. Pemerintah Kabupaten Mamuju telah menunjuk sesuai tugas dan fungsinya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara ataupun perbuatan untuk mengembangkan apa yang menjadi tujuan, misalkan, pemerintah selalu berusaha dalam pengembangan pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pengembangan pariwisata yang optimal di Kabupaten Mamuju dapat berdampak meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara menarik wisatawan daerah maupun luar daerah untuk datang berkunjung ke tempat wisata setempat. Namun, pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju tentu saja bukan hal yang mudah, pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju. Sementara diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Barat merupakan Provinsi yang masih muda dan Kabupaten Mamuju yang rencananya akan dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi masih sementara proses pembangunan agar layak menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju. Kemudian bagaimana peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju tersebut. Serta apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang selama ini dialami oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju. Adapun gambaran kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan, yakni sebagai berikut.

Gambar 1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian Kualitatif yaitu tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

3.3 Jenis Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data peneliti yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun informan itu berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara *face to face* untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata terkhusus dibidang pelaksanaan, perencanaan dan pertanggungjawaban. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui media yang sifanya melengkapi data primer seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

3.4.1 Wawancara Mendalam (*deep interview*)

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan face to face kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara deep interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

3.4.2 Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.

3.4.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung permasalahan penelitian. Sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan realita. Adapun informan dari penelitian ini adalah :

- a. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.
- b. Sub Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju.
- c. Sub Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Staf Seksi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju.
- e. Staf Seksi Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju.
- f. Staf Seksi Sarana dan Obyek Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju.
- g. Penjaga Pintu Daya Tarik Wisata Pulau Karampuang.

3.5 Definisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian disusun definisi operasional yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah daerah yang dimaksud peneliti adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju.
2. PAD yang dimaksud peneliti adalah Pendapatan Asli Daerah.
3. Upaya yang dimaksud peneliti adalah upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju.
4. Peningkatan PAD yang dimaksud peneliti adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2015, 2016 dan 2017.
5. Pengembangan pariwisata yang dimaksud peneliti adalah :
 - a. Meningkatkan promosi wisata daerah.
 - b. Mengembangkan wisata produktif berbasis lingkungan.
 - c. Menumbuhkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam membangun sektor pariwisata.
 - d. Meningkatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis yang akan digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan data yang didapatkan dari lapangan kemudian dilakukan proses editing, klasifikasi data, tabulasi data, dan analisis data yang kemudian menjadi kesimpulan untuk menjawab masalah yang akan diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini membahas beberapa permasalahan yang menjadi indikator penelitian tentang upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju.

4.1 Gambaran umum Kabupaten Mamuju

4.1.1 Sejarah Kabupaten Mamuju

Kerajaan Mamuju pada tahun 1540 perpaduan dari tiga buah kerajaan di Rante Lisuan Ada' Kurungan Bassi, yakni Kurri-Kurri, Langgamonar dan Managgallangoleh Pue Tunileo. Dalam sejarah pelabuhan Kurri-Kurri sebagai Pelabuhan Internasional yang telah menjadi persingahan Portugis membawa

barang Komuditas pada rute Kerajaan Siang di Pangkaje'ne sebelum Gowa dan Manado Tua (Sulawesi Utara) dari dasar ini atas pemikiran dan fakta sejarah maka disepakati melalui hasil seminar yang diselenggarakan oleh Hiper maju dan Persukma Makassar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju bahwa tahun 1540 merupakan hari jadi Mamuju dan ditindak lanjuti oleh Bupati dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Mamuju.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju hasil pemilu 1999 menerima Ranperda dan setelah melalui pembahasan termasuk dengar pendapat dengan para tokoh sejarah, budayawan dan tokoh intelektual di daerah ini, dalam sidang paripurna tanggal 9 Agustus 1999 secara resmi Ranperda tentang Hari Jadi Mamuju disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju. Peraturan daerah ini adalah Perda Nomor 05 Tahun 1999 diundangkan pada Tanggal 10 Agustus 1999 dan dicantumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1999 Nomor 14. Inti dari Perda tersebut adalah menetapkan Tanggal 14 Juli 1540 Sebagai Hari Jadi Mamuju.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah tersebut diuraikan latar belakang penetapan waktu Hari Jadi Mamuju dan kesempatan ini dikutip beberapa kalimat butir C (penjelasan peraturan) sebagai berikut :

"Apabila dilihat dari sudut yuridis formal, maka Hari Jadi Mamuju akan jatuh pada tanggal 14 Juli 1959, yaitu saat ditetapkannya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Namun akal sehat akan membawa kita untuk tidak terpaku dan terperangkap dalam

kelakuan formalitas yang sempit yang kelak dapat mengaburkan maksud dan tujuan menetapkan Hari Jadi Mamuju itu sendiri".

Dengan demikian, Hari Jadi Mamuju akan bermakna dan bernilai moral yang amat mendalam bukan sekedar formalitas belaka tetapi dapat memberi makna simbolik tentang harkat, hakekat, citra dan jati diri untuk selanjutnya berperan sebagai wahana motivasi bagi masyarakat demi melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah Mamuju.

Ungkapan Mutiara hikmah nilai budaya dan tradisi masyarakat Mamuju mengatakan: "Todiari Teppo Dolu, Parallu Nikilalai Sule Wattu la Te'e, Laiyalai Mendiari Peppondonganna Katuoatta'ilalan Era Laittingayoaianna".

Dari kutipan diatas tergambar dasar-dasar pemikiran penetapan waktu yang diambil sebagai Hari Jadi Mamuju dan peristiwa yang menjadi patokan penetapannya adalah terbentuknya Kerajaan Mamuju dari hasil perpaduan tiga buah kerajaan Kurri-Kurri, Langgamonar dan Managallang. Selanjutnya, dasar pemikiran dan pertimbangan penetapan waktu tersebut secara terinci dari tanggal, bulan dan tahun yang diambil diungkapkan sebagai berikut:

a. Tanggal 14 (Empat Belas)

- 1) Angka 14 adalah angka kelipatan dua dari tujuh, yang oleh tradisi Masyarakat Mamuju menyebutnya Penduang Pitu.
- 2) Jumlah hari dalam sebulan bergerak antara 28/29 dan 30/31 hari dengan demikian, posisi tanggal 14 berada pada posisi tengah yang diapit 14/15 hari sebelum dan 15/16 hari sesudahnya.

- 3) Tanggal 14 akan selalu berada pada posisi mendekati kebenaran, karena keseimbangan jumlah hari sebelum dan sesudahnya dalam sebulan.
- 4) Nilai-nilai tradisi yang lekat dengan tanggal 14 adalah perhitungan hari ke-14 dengan posisi bulan situru' yang berarti mufakat bulan malam ke-14 adalah purnama.
- 5) Angka 14 disimbolkan dengan 14 Distrik Swapraja di Mamuju.

b. Bulan Juli

Bulan Juli adalah bulan berada pada posisi urutan 7 dari 12 bulan setahun. Nilai tradisi angka 7 bagi Masyarakat Mamuju dipandang amat sakral penuh makna. Demikian letaknya angka 7 dengan masyarakat Mamuju di bawah ini terinventarisir dengan angka 7 sebagai berikut :

- 1) Ada' Gala'gar Pitu (7 Pemangku Adat)
- 2) Pitu Ba'bana Binanga (7 Kerajaan di pesisir)
- 3) Pitu Ulunna Salu' (7 Kerajaan di Hulu Sungai)
- 4) Penduang Pitu (14 sebagai kelipatan 2 dari 7)
- 5) Nene Pitullapis (Nenek tujuh turunan)
- 6) Ampo Pitullapis (Cucu tujuh turunan)
- 7) Langi' Pitussusung (Langit tujuh susun)
- 8) Tanpo Pitullapis (Tanah tujuh lapis)
- 9) Tanete Pituttodong (Gunung tujuh bersusun)
- 10) Tobo Lengkong Pitu (Keris berlekuk tujuh)
- 11) Nambo Pitundappa (Kedalaman tujuh depah)

- 12) Pitu Tokke Pitu Sassa (Tujuh Tokke dan tujuh Cecak)
- 13) Anjoro Pitu (Kelapa 7)
- 14) Belua' bare pitu (Rambut terbelah tujuh)
- 15) Orang Lanta' Pitu (Tangga beranak tujuh)
- 16) Mingguling Pempitu Dapurang (Mengelilingi dapur hingga 7 kali)
- 17) Pitumbongi, Pitungallo (7 hari 7 malam)
- 18) Bulan Juli adalah bulan saat diundangkannya UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi.
- 19) Bulan dengan posisi urutan 7 berada pada posisi tengah yang diapit oleh 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan sesudahnya termasuk bulan Juli itu sendiri dari 12 bulan dalam setahun.
- 20) Dengan bulan Juli akan selalu berada pada posisi tengah yang mendekati kebenaran karena keseimbangan jumlah bulan sebelum dan sesudahnya dalam setahun.
- 21) Bulan Juli adalah bulan yang berada pada posisi urutan ke-7 dari 12 bulan dalam setahun.

4.1.2 Letak Geografis

Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah sebesar 5.064,19 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 11 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kalumpang dengan luas 1.731,99 km² atau 34,20 persen dari luas wilayah Kabupaten Mamuju. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Balabalakang dengan luas 21,86

km² atau 0,43 persen. Kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota Kabupaten Mamuju adalah Kecamatan Balabalakang yaitu 202 km.

4.1.3 Kependudukan

Data penduduk tahun 2016 yang disajikan pada bab ini adalah angka estimasi penduduk yang dihitung berdasarkan proyeksi penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 adalah 272.258 jiwa yang terdiri atas 138.698 laki-laki dan 133.560 perempuan. Pada periode yang sama, diperkirakan terdapat sekitar 60.713 rumah tangga dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga sekitar 4,48 orang. Pada 2016, kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju mencapai 54 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Mamuju dengan kepadatan penduduk 329 jiwa per km². Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Mamuju di atas 100. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mamuju lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Semua kecamatan memiliki angka rasio jenis kelamin di atas 100.

4.1.4 Pemerintahan

a. Administrasi Pemerintahan

Secara administrasi, sejak tahun 2003 telah terjadi pemekaran dua kabupaten dari Kabupaten Mamuju seiring dengan tuntutan otonomi daerah, yaitu:

- 1) Kabupaten Mamuju Utara dimekarkan dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2003.
- 2) Kabupaten Mamuju Tengah dimekarkan dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2013.

Sampai tahun 2017, Kabupaten Mamuju terdiri atas 11 kecamatan, 88 desa dan 13 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Tommo dengan 14 desa. Sedangkan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit yaitu Kecamatan Balabalakang dengan 2 desa

b. Aparatur Pemerintahan

Penyempurnaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah tingkat Daerah yang telah dilakukan Pemerintah Daerah yang memberikan dasar--dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun asas tugas pembantuan secara serasi.

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi maka urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya, dalam arti bahwa prakarsa diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut pe--nentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah Aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri, terutama Dinas-dinas Daerah. Dalam kaitan ini maka oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan berbagai keputusan tentang susunan organisasi Pemerintah Daerah, tugas dan wewenang tiap unit

organisasi, demikian pula tatakerja dan tata hubungan kerja, di antaranya yang terakhir ialah perbaikan organisasi. Hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.

Penyempurnaan tersebut adalah untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas-tugas yang semakin meluas. Selanjutnya untuk semakin berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan dan wewenangnya mensuk-seskan pelaksanaan program-program pembangunan dengan melakukan pengendalian sebaik-baiknya dan koordinasi terpadu terhadap segenap jajaran aparatur Pemerintah Pusat di Daerah, jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat secara efektif.

Mengenai peranan Pemerintah Daerah dalam pembangunan nasional dapat dikemukakan dalam keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, sebagai berikut :

- 1) Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 5) Bupati adalah Bupati Mamuju;
- 6) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;
- 7) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
- 8) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju
- 9) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
- 10) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
- 11) Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju;
- 12) Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mamuju;
- 13) Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mamuju;
- 14) Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Mamuju;

- 15) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- 16) Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
- 17) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
- 18) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 19) Pelayanan Dasar adalah pelayanan Republik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
- 20) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
- 21) Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat daerah.
- 22) Pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari Bupati, Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah

daerah.

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertambangan Perindustrian dan Energi, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, Satpol Pamong Praja, RSUD Kabupaten Kecamatan, dan Kelurahan.

c. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Mamuju

1) Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju adalah
MEWUJUDKAN MAMUJU YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RAMAH.

Visi tersebut mempunyai makna :

- a) MAMUJU YANG MAJU : Makna Mamuju yang Maju menunjukkan keadaan yang dinamis dan bersifat holistik, yaitu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya yang terjadi di Mamuju dari waktu ke waktu, baik secara fisik maupun sosial. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat termasuk daya saing daerah yang semakin membaik.
- b) SEJAHTERA : Kondisi sosial ekonomi (lahir dan batin) yang senantiasa dicita-citakan oleh masyarakat dan menunjukkan derajat kemanusiaan.
- c) RAMAH : adalah perwujudan sikap mental masyarakat Mamuju yang Malaqbi serta memahami daerahnya sebagai daerah terbuka yang menjadi magnet bagi orang lain untuk datang.

2) Misi

Sebagai penjabaran Visi Pemerintah Kabupaten Mamuju diatas disusunlah Misi pembangunan Kabupaten Mamuju 2016– 2021 dalam rangka mewujudkan Visi Mewujudkan Mamuju Yang Maju, Sejahtera, dan Ramah, dengan Misi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Layanan Masyarakat melalui Dukungan Kesehatan Gratis dan Pendidikan Gratis Masyarakat;
- b) Menjaga Kestinambungan dan Percepatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan;

- c) Mendorong Kemandirian Ekonomi dengan Pertanian sebagai Lokomotif Utama dan Pengembangan Usaha serta Industri Rumah tangga
- d) Mewujudkan Aparatur Sipil yang Kompeten dan bersahaja serta mendorong semakin kuatnya penerapan prinsip Good Governance dan clean Government;
- e) Mewujudkan Mamuju sebagai Daerah Terbuka, Berbudaya, Aman dan Beriman.

d. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju

1) Visi

Mewujudkan pariwisata Kabupaten Mamuju yang maju dan ramah lingkungan. Maksud dari kandungan visi tersebut dapat dijelaskan, yaitu Pariwisata kabupaten Mamuju yang maju adalah terjadinya perubahan pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata sehingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah kunjungan, peningkatan pendapatan asli daerah serta mengedepankan budaya bersih dalam pengelolaan objek wisata.

2) Misi

- a) Mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan sarana dan prasarana serta promosi pariwisata.
- b) Menggali dan mengembangkan kekayaan nilai budaya dan seni melalui riset, pagelaran dan festival.

- c) Meningkatkan kapasitas SDM bagi pelaku usaha pariwisata, dan mendorong terciptanya obyek wisata yang ramah lingkungan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamuju, tepatnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju. Adapun Obyek wisata yang menjadi sampel penelitian adalah Pulau Karampuang, Rumah Adat Kabupaten Mamuju dan Kali So'do.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

4.2 Gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju

TABEL 3

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju pada tahun 2015, 2016 dan 2017

NO	TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	%
1	2015	74.634.661.800,00	58.269.572.270,00	78,07
2	2016	74.634.661.800,00	69.378.832.669,87	92,96
3	2017	84.634.661.800,00	78.442.898.631,50	92,66

(Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah)

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah terendah di Kabupaten Mamuju adalah pada tahun 2015 yaitu sebanyak

58.269.572.270,00 atau sebanyak 78,07%, sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi adalah pada tahun 2017 yaitu sebanyak 78.442.898.631,50 atau sebanyak 92,66%.

4.2.1 Realisasi PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju

a. Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2015

TABEL 4

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015

JENIS PAD	TARGET PAD	REALISASI PAD	%
Retribusi Tempat Rekreasi	140.000.000,00	64.425.000,00	46,02
Retribusi Ketatausahaan	10.000.000,00	12.000.000,00	120,00
Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	76.425.000,00	50,95

(Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah)

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015 adalah 76.425.000,00 atau sebesar 50,95%.

b. Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2016

TABEL 5

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2016**

JENIS PAD	TARGET PAD	REALISASI PAD	%
Retribusi Tempat Rekreasi	140.000.000,00	73.000.000,00	52,14
Retribusi Ketatausahaan	10.000.000,00	7.125.000,00	71,25
Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	80.125.000.00	53,42

(Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 adalah 80.125.000,00 atau sebesar 53,42%.

c. Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2017

TABEL 6

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2017**

JENIS PAD	TARGET PAD	REALISASI PAD	%
Retribusi Tempat Rekreasi	140.000.000,00	67.250.000,00	48,04
Retribusi Ketatausahaan	10.000.000,00	13.950.000,00	139,50
Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	81.200.000,00	54,13

(Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah)

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2017 adalah 81.200.000,00 atau sebesar 54,13%.

4.2.2 Data Wisatawan

- a. Data Wisatawan tahun 2015

TABEL 7

**Data tentang kunjungan Wisatawan terhadap tiga Daya Tarik Wisata
Kabupaten Mamuju pada tahun 2015**

NO	KAB.	NAMA DTW YANG DIKUNJUNGI	JUMLAH WISATAWAN
1	Mamuju	Permandian So'do	10.860
2	Mamuju	Pulau Karampuang	2.633
3	Mamuju	Rumah Adat Mamuju	7.534

(Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamuju)

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa kunjungan terendah Wisatawan adalah Pulau Karampuang yaitu sebanyak 2.633 Wisatawan, sedangkan kunjungan tertinggi Wisatawan adalah Permandian So'do yaitu sebanyak 10.860 Wisatawan.

b. Data Wisatawan 2016

TABEL 8

**Data tentang kunjungan Wisatawan terhadap tiga Daya Tarik Wisata
Kabupaten Mamuju pada tahun 2016**

NO	KAB.	NAMA DTW YANG DIKUNJUNGI	JUMLAH WISATAWAN	
			DOMESTIK	MANCANEGARA
1	Mamuju	Permandian So'do	10.300	4
2	Mamuju	Pulau Karampuang	4.700	4
3	Mamuju	Rumah Adat Mamuju	8.400	4
4	Mamuju	Air Terjun Tama Sapi	500	-

(Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa kunjungan terendah Wisatawan adalah Pulau Karampuang yaitu sebanyak 4.700 Wisatawan, sedangkan kunjungan tertinggi Wisatawan adalah Permandian So'do yaitu sebanyak 10.300 Wisatawan.

c. Data Wisatawan 2017

TABEL 9

**Data tentang kunjungan Wisatawan terhadap tiga Daya Tarik Wisata
Kabupaten Mamuju pada tahun 2017**

NO	KAB.	NAMA DTW YANG DIKUNJUNGI	JUMLAH WISATAWAN	
			DOMESTIK	MANCANEGERA
1	Mamuju	Permandian So'do	9.180	20
2	Mamuju	Pulau Karampuang	3.789	11
3	Mamuju	Rumah Adat Mamuju	3.370	30

(Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa kunjungan terendah Wisatawan adalah Rumah Adat Mamuju yaitu sebanyak 3.370 Wisatawan, sedangkan kunjungan tertinggi Wisatawan adalah Permandian So'do yaitu sebanyak 9.180 Wisatawan.

4.3 Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Mamuju

4.3.1 Meningkatkan Promosi Wisata Daerah

Upaya peningkatan promosi wisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju masih belum maksimal di setiap Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Mamuju, hal ini dapat dijelaskan

dengan membandingkan antara jumlah keseluruhan Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Mamuju dengan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju.

Menurut data tentang Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju yaitu berjumlah 45 Daya Tarik Wisata, sedangkan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015 hanya sebanyak 4 Daya Tarik Wisata, pada tahun 2016 Daya Tarik Wisata yang dipromosikan sebanyak 3 Daya Tarik Wisata dan pada tahun 2017 Daya Tarik yang dipromosikan berjumlah 4 Daya Tarik Wisata saja.

TABEL 10

Data tentang Daya Tarik Wisata yang dipromosikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

NO	KAB.	TAHUN	DAYA TARIK WISATA YANG DIPROMOSIKAN
1	Mamuju	2015	Pulau Karampuang
			Pemandian So'do
			Air Terjun Tamasapi
			Rumah Adat Mamuju
2	Mamuju	2016	Pulau Karampuang

			Permandian So'do
			Air Terjun Tamasapi
3	Mamuju	2017	Pulau Karampuang
			Pemandian So'do
			Air Terjun Tamasapi
			Kolam Tamasapi
4	Mamuju	2018	Pulau Karampuang
			Pemandian So'do
			Air Terjun Tamasapi
			Kolam Tamasapi
			Pantai Pasir Putih Ngalo'
			Air Panas Tahaya-Haya

(SUMBER DATA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa Daya Tarik Wisata terendah yang dipromosikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju adalah pada tahun 2016 yaitu sebanyak empat Daya Tarik Wisata yang dipromosikan, sedangkan Daya Tarik Wisata terbanyak yang dipromosikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju adalah pada tahun 2018 yaitu sebanyak enam Daya Tarik Wisata yang dipromosikan.

Selain melakukan promosi Daya Tarik Wisata, Dinas Kebudayaan Kabupaten Mamuju juga melakukan promosi Daya Tarik Wisata berupa event dan festival untuk memperkenalkan Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Mamuju. Event dan Festival yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dalam rangka memperkenalkan Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju dari tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dijelaskan melalui tabel sebagai berikut :

TABEL 11

Data tentang Event dan Festival yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

NO	TAHUN	DATA EVENT
1	2015	Festival Kuliner Ramadhan
		Mamuju Food Carnival
		Manakarra Fair
2	2016	Kemilau Sulawesi
		Hari Jadi Taman Mini
		Manakarra Wisdom
		Sandeq Race
3	2017	Kemilau Sulawesi
		Sandeq Race
		Mamuju Food Carnival
		Manakarra Fair
4	2018	Film Spot Diving
		Tou Serem

		Film Promosi
		Kemilau Sulawesi
		Sandeq Race
		Mamuju Food Carnival
		Festival Kuliner Ramadhan
		Manakarra Fair

(Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa Event dan Festival paling sedikit yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju adalah pada tahun 2015 yaitu sebanyak tiga Event dan Festival yang telah dilaksanakan, sedangkan Event dan Festival terbanyak yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju adalah pada tahun 2018 yaitu sebanyak delapan Event dan Festival yang telah dilaksanakan.

Promosi Daya Tarik Wisata masih belum merata disetiap daerah di Kabupaten Mamuju yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju, menurut hasil wawancara saya dengan Bapak Muh. Radi, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa hal ini dikarenakan adanya Daya Tarik Wisata prioritas yang lebih fokus untuk dikembangkan di Kabupaten Mamuju yaitu Pulau Karampuang, Permandian So'do dan Rumah Adat Mamuju, kemudian selain daripada hal itu kebanyakan Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Mamuju adalah milik masyarakat dan kebanyakan masyarakat masih belum mengerti akan dampak positif yang mereka dapat jika bekerjasama dengan pemerintah daerah, dampak positif yang dimaksudkan seperti perbaikan jalan, promosi

Daya Tarik Wisatanya, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah. Namun lebih lanjut Bapak Muh. Radi, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap berupaya melakukan sosialisasi tentang kepariwisataan kepada masyarakat setempat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepariwisataan.

Selain mempromosikan Daya Tarik Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mengadakan event dan festival tiap tahunnya untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke tempat-tempat Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Mamuju. Menurut Sumber yang peneliti dapat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju event dan festival yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2015 sampai 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2015 event dan festival yang diadakan oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju yaitu Festival Kuliner Ramadhan, Mamuju Food Carnival dan Manakarra Fair.
2. Pada Tahun 2015 event dan festival yang diadakan oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju yaitu Kemilau Sulawesi, Hari Jadi Taman Mini, Manakarra Wisdom dan Sandeq Race.
3. Pada Tahun 2015 event dan festival yang diadakan oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju yaitu Kemilau

Sulawesi, Sandeq Race, Mamuju Food Carnival dan Manakarra Fair.

Lebih lanjut mengenai promosi Daya Tarik Wisata, dari hasil wawancara saya kepada bapak Muh. Radi, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa bentuk mempromosikan Daya Tarik Wisata yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju yaitu mempromosikan Daya Tarik Wisata melalui seminar-seminar, melalui pihak Travel dan melalui event-event yang berada diluar kota maupun didalam kota.

4.3.2 Mengembangkan Wisata Produktif Berbasis Lingkungan

Pengembangan wisata produktif berbasis lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal, hal ini dikarenakan gerakan Kelompok Sadar Wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju untuk memberdayakan masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata tidak berjalan dengan baik. Menurut hasil wawancara saya dengan bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengatakan bahwa hal ini dikarenakan masih banyak desa atau Kecamatan di Kabupaten Mamuju yang masih baru dibentuk.

Lebih lanjut menurut Bapak Andi selaku penjaga pintu di Pulau Karampuang mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat sekitar Pulau Karampuang masih belum sepenuhnya siap untuk pariwisata. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya petugas kebersihan yang menjaga agar lingkungan tetap bersih sehingga wisatawan yang datang juga merasa nyaman sehingga tercipta Sapta Pesona di Pulau Karampuang yang pada prinsipnya menciptakan kebersihan, keamanan, ketertiban, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan.

Selain Pulau Karampuang menurut hasil observasi yang telah dilakukan di Rumah Adat Mamuju dan Permandian So'do juga memiliki masalah yang sama yaitu tidak memiliki petugas penjaga kebersihan, sehingga kualitas kebersihan di Daya Tarik Wisata tersebutpun tidak terjamin karena kebersihan lingkungan yang ada di Pulau Karampuang, Permandian So'do dan Rumah Adat Mamuju adalah atas kesadaran masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata saja untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung.

4.3.3 Menumbuhkan peran Aktif Masyarakat untuk ikut serta dalam membangun Sektor Pariwisata

Upaya untuk menumbuhkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam membangun sektor pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju masih belum maksimal, hal ini dapat terlihat dari sedikitnya gerakan Kelompok Sadar Wisata yang

aktif di Kabupaten Mamuju yaitu hanya 2 Kelompok Sadar Wisata yang aktif menurut Data yang saya dapat dari Staf seksi promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju antara lain :

1. Kelompok Sadar Wisata Anjoro yang beralamat di Jalan Musa Karim.
2. Penenun Sekomadi yang beralamat di Jalan poros Bambu.

Menurut hasil wawancara saya dengan bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengatakan hal ini dipengaruhi karena adanya beberapa desa atau kecamatan yang memiliki Daya Tarik Wisata masih baru dibangun dan kebanyakan daerah yang memiliki Daya Tarik Wisata juga tidak dikelola oleh swasta maupun pemerintah daerah.

Lebih lanjut menurut Bapak Andi selaku penjaga pintu di Pulau Karampuang mengatakan bahwa jika pemerintah daerah melakukan sosialisasi tentang kepariwisataan, orang yang mengikuti sosialisasi tersebut hanya itu-itulah saja.

Dari hasil observasi saya di tiga tempat Daya Tarik Wisata yaitu Pulau Karampuang, Permandian So'do dan Rumah Adat Mamuju, bentuk pelayanan yang dilakukan masyarakat terhadap wisatawan terbentuk karena kesadaran dari masyarakatnya sendiri tanpa arahan dari pemerintah daerah, hal ini dapat terlihat yaitu sebagai berikut :

1. Penataan rumah makan di Pulau Karampuang dan Permandian So'do yang tidak tertata dengan rapi.

2. Perahu mesin yang disewakan kepada wisatawan untuk pergi ke Pulau Karampuang adalah usaha sambilan dari para nelayan yang ada di Pelabuhan Kabupaten Mamuju.
3. Tidak adanya toko cinderamata di Daya Tarik Wisata Pulau Karampuang, Permandian So'do dan Rumah Adat Mamuju.
4. Tidak tersedianya kendaraan umum untuk pergi ke Daya Tarik Wisata Pulau Karampuang, Rumah Adat Mamuju dan Permandian So'do.

4.3.4 Meningkatkan peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju

Upaya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Mamuju dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Mamuju masih bersifat individual dimana pemerintah mengelola sendiri Daya Tarik Wisatanya dan begitupun juga dengan Daya Tarik Wisata yang dikelola Swasta maupun masyarakat.

Menurut hasil wawancara saya dengan bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengatakan bahwa ada beberapa tempat yang seharusnya dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju namun dikelola oleh lembaga lain seperti :

1. Waterboom Gentungan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat
2. Wisata Buatan Anjungan Manakarra yang dikelola oleh Pelayanan Pintu Satu Atap (PTSP) Kabupaten Mamuju.

Lebih lanjut bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengatakan bahwa persoalan pengelolaan Waterboom Gentungan seharusnya dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju karena masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju itu sendiri, sedangkan mengenai Wisata Buatan Anjungan Manakarra tidak dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dikarenakan Wisata Buatan Anjungan Manakarra masih berstatus tempat umum seperti taman kota, sehingga tidak dapat dikelola secara langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju.

TABEL 12

Data tentang status pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju di tahun 2018

NO	KEC.	OBJEK WISATA	LOKASI	STATUS PENGELOLAAN
1		Pantai Bone-Bone	Desa Bambu	Belum di kelola
		Air Terjun Tamasapi	Tamasapi Kel. Mamunyu	PEMDA
		Kolam Renang So'do	So'do Kel. Binanga	PEMDA
		Gua Lidah	Desa Karampungan	PEMDA
		Sumur 3 Rasa	Desa Karampungan	PEMDA
		Sumur Perahu	Desa Karampungan	PEMDA
		Air Panas Tahaya-Haya	Kelurahan Karema	Belum di kelola
		Kolam Renang Happy Song	Jl. Wr. Monginsidi	SWASTA
		Kolam Renang Passokorang	Btn Passokorang	SWASTA
		Rumah Adat Kabupaten Mamuju	Jl. Ks. Tubun	PEMDA

NO	KEC	OBJEK WISATA	LOKASI	STATUS PENGELOLAAN
2	Simboro	Wisata Pantai dan Resort	Landi Kel. Rangas	SWASTA
		Air Terjun Botteng	Desa Botteng	Belum di kelola
		Batu Losa	Desa Tapandulu	Belum di kelola
		Goa Saletto	Desa Saletto	Belum di kelola
		Dermaga Sumare	Desa Sumare	SWASTA
		Pantai Eko Wisata Berkah	Desa Tapandullu	SWASTA
3	Tappalang	Permandian Salasang Mettiallo	Desa Taan	Belum di kelola
		Pantai Dayanginna	Desa Galung	Belum di kelola
		Permandian Yamsam Kuridi	Desa Galung	SWASTA
4	Tapalang Barat	Pantai Pasir Putih Ngalo	Desa Dungkait	Belum di kelola
		Gua Dungkait	Desa Dungkait	Belum di kelola
		Pantai Labuangrano	Desa Labuangrano	Belum di kelola
		Air Terjun Ampera	Desa Lebani	Belum di kelola
		Air Panas Passiangan	Desa Lebani	Belum di kelola
5	Kalukku	Pantai Beru-Beru	Desa Beru-Beru	Belum di kelola

		Hutan Mangrove	Desa Bebanga	SWASTA
NO	KEC	OBYEK WISATA	LOKASI	STATUS PENGELOLAAN
		Pantai Lombang-Lombang	Desa Sinyonyoi	SWASTA
		Air Terjun Sondoang	Desa Sondoang	Belum di kelola
		Goa Batu Mehurri	Desa Sondoang	Belum di kelola
		Pantai Tae Manu' Belang-Belang	Desa Belang-Belang	SWASTA
		Pantai Kayumate	Desa Kalukku Barat	Belum di kelola
		Hutan Mangrove	Desa Ampallas	SWASTA
		Wisata Alam Jordan (Water Boom)	Gentungan Desa Bebanga	PEMROV SULBAR
6	Papalang	Pantai Beringin Cinta	Desa Bonda	Belum di kelola
		Air Terjun Tujuh Lapis	Desa Boda-Boda	Belum di kelola
		Air Terjun Sisango	Desa Sisango	Belum di kelola
7	Sampaga	Pantai Dato'	Desa Sampaga	Belum di kelola
		Air Terjun Kalonding	Desa Kalonding	Belum di kelola
8	Tommo	Air Terjun Salumadingin	Desa Tamemongga	Belum di kelola
		Batu Ukir	Desa Campaloga	Belum di kelola
		Danau Buntu Lalong	Desa Leling Utara	Belum di kelola

NO	KEC	OBJEK WISATA	LOKASI	STATUS PENGELOLAAN
9	Bonehau	Goa Balanda	Desa Bonehau	Belum di kelola
		Air Terjun Taranusi	Desa Bonehau	Belum di kelola
		Air Panas Maiso	Desa Bonehau	Belum di kelola
		Air Terjun Mappu	Desa Mappu	Belum di kelola
10	Kalumpang	Batu Pare	Desa Kalumpang	Belum di kelola

(Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa pemerintah daerah telah mengelola Daya Tarik Wisata sebanyak enam Daya Tarik Wisata, sedangkan Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Swasta adalah sebanyak sepuluh Daya Tarik Wisata dan Daya Tarik Wisata yang belum dikelola sampai saat ini adalah sebanyak dua puluh sembilan Daya Tarik Wisata.

Dari hasil observasi yang saya lakukan di tiga Daya Tarik Wisata prioritas yaitu Pulau Karampuang, Permandian So'do dan Rumah Adat Mamuju yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju, tidak ada satupun dari tempat Daya Tarik Wisata tersebut yang memiliki hubungan kerjasama dengan pihak Swasta. Menurut bapak Muh. Radi, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mamuju mengatakan hal ini dikarenakan kurangnya SDM dan anggaran yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mamuju sehingga sulit untuk membuat inovasi

dan kurangnya kreatifitas dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Daya Tarik Wisata yang dikelola pemerintah daerah. Menurut data yang peneliti dapat, sumber pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa adanya dana yang bersumber dari pihak swasta atau investor.

TABEL 13

Sumber Dana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015, 2016 dan 2017

NO	TAHUN	TOTAL DANA	SUMBER DANA
1	2015	7.282.311.904	APBD
2	2016	6.289.931.904	APBD
3	2017	7.093.064.758	APBD

(Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Mamuju)

Berdasarkan Tabel 13 diketahui Anggaran Belanja dan Pendanaan terendah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju adalah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 6.289.931.904 sedangkan Anggaran Belanja dan Pendanaan tertinggi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju adalah pada tahun 2015 yaitu sebanyak 7.282.311.904.

Menurut bapak Muh. Radi, S.IP selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa jumlah anggaran dari tahun 2015 sampai 2017 tidak mencukupi untuk melakukan pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju, bukan hanya tidak cukup untuk membiayai pengembangan Daya Tarik Wisata secara keseluruhan, bahkan untuk membiayai tiga obyek wisata unggulan Kabupaten

Mamuju pun masih belum cukup. Hal ini dikarenakan dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju dana anggaran yang digunakan bukan hanya untuk menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pariwisata, namun dana anggaran tersebut juga dipakai untuk pelatihan, seminar, sosialisasi, kunjungan kerja, pelaksanaan event dan perbaikan kantor.

Menurut bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengatakan sudah ada beberapa tempat Daya Tarik Wisata yang telah diserahkan pengelolaannya kepada investor karena tidak cukupnya anggaran untuk mendanai Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Mamuju, seperti Pantai Lombang-lombang dan Gentungan.

4.4 Faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju

Pengembangan pembangunan pariwisata yang mempengaruhi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju di tahun 2015, 2016 dan 2017 terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

4.4.1 Faktor Pendukung

1) Letak Daerah yang Strategis

Kabupaten Mamuju memiliki letak daerah yang cukup strategis, menurut bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengatakan bahwa

hal ini dikarenakan Kabupaten Mamuju merupakan daerah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat yang terletak diantara jalur kota Palu Sulawesi Tengah dan kota Makassar Sulawesi Selatan sehingga Kabupaten Mamuju dapat menjadi penghubung yang melewati jalur darat dan diharapkan dapat menjadi tempat persinggahan untuk berwisata bagi orang-orang yang melewati Kabupaten Mamuju dan yang berkunjung karena persoalan pekerjaan.

2) Fasilitas Penunjang Pariwisata

Kabupaten Mamuju memiliki ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata yang mendukung berjalannya berwisata bagi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Mamuju seperti tersedianya rumah makan, perbankan, bandara, terminal, pelabuhan, travel agent. Walaupun sampai saat ini belum terdapat kerjasama dengan pemerintah daerah namun fasilitas ini tetap berkontribusi dalam menunjang aktivitas pariwisata di Kabupaten Mamuju. Adapun fasilitas yang ada di Pulau Karampuang, Rumah Adat Mamuju dan Permandian So'do adalah sebagai berikut :

a. Pulau Karampuang

Pulau Karampuang memiliki fasilitas yaitu rumah makan, listrik, air bersih, gazebo, transportasi umum, pelabuhan, snorkeling, diving dan trekking.

b. Permandian So'do

Permandian So'do memiliki fasilitas yaitu lahan tempat parkir, rumah makan, listrik, air bersih dan gazebo.

c. Rumah Adat Mamuju

Rumah Adat Mamuju memiliki fasilitas yaitu toilet, listrik, air bersih dan gazebo.

4.4.2 Faktor Penghambat

1) Persoalan Kebijakan

Adanya perubahan periode kepemimpinan Kepala Daerah di Tahun 2015 dan 2016 yaitu selesainya masa jabatan Drs. H. Suhardi Duka, M.M. selaku Bupati Kabupaten Mamuju priode 2010 sampai 2015, kemudian digantikan oleh Drs. H. Habsi Wahid, M.M. selaku Bupati yang baru priode 2016 sampai 2021. Perubahan priode kepemimpinan ini mempengaruhi arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mamuju. Dari hasil wawancara saya kepada bapak Muh. Radi, S.IP selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mamuju mengatakan, bahwa upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju tidak maksimal dikarenakan kebijakan perencanaan pembangunan periode

pemerintahan Bupati Drs. H. Habsi Wahid, M.M. berfokus kepada pengelolaan dan pengembangan perkebunan, sedangkan alokasi dana anggaran ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak menjadi prioritas, sehingga kondisi ini berdampak terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju.

Kemudian Tidak adanya Perda RIPPDA Kabupaten Mamuju (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) tahun 2016-2021 yang menjadi pedoman pelaksanaan pengembangan pembangunan Pariwisata, hal ini juga menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju selama 3 tahun belakangan ini. Permasalahan ini, mengakibatkan tidak bisanya dibuat pemetaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju, kurangnya landasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang searah dengan visi dan misi Kepala Daerah yang menjabat periode 2016 sampai 2021 dan sulitnya membuat kerjasama yang menjanjikan antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Masalah mengenai tidak adanya RIPPDA Kabupaten Mamuju periode tahun 2016-2021 dikarenakan belum disahkannya Perda RIPPAPROV (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi) periode tahun 2016-2021, yang rencana akan disahkan akhir tahun 2018.

2) Persoalan Promosi Daya Tarik Wisata

Promosi Daya Tarik Wisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju tidak merata di seluruh kecamatan. Menurut sumber data yang saya dapat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju, pada tahun 2015 Daya Tarik Wisata yang dipromosikan adalah Pulau Karampuang, Permandian So'do, Air Terjun Tamasapi dan Rumah Adat Mamuju, selanjutnya pada tahun 2016 Daya Tarik Wisata yang dipromosikan juga tidak jauh beda hanya saja di tahun 2016 Rumah Adat Mamuju tidak lagi dipromosikan sebagai Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju. Begitupula di tahun 2017, Daya Tarik Wisata yang dipromosikan juga tetap sama dari tahun 2015 namun Rumah Adat Mamuju tidak lagi dipromosikan. Hal ini dikarenakan dari tahun 2015 sampai 2017 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju fokus dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Alamnya.

Namun perlu diketahui bahwa dari tahun 2015 sampai 2017 Daya Tarik Wisata yang dipromosikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju adalah Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah saja, tidak ada satupun yang dipromosikan dari Daya Tarik Wisata yang dikelola swasta maupun yang tidak dikelola. Padahal pemerintah daerah seharusnya berperan penting sebagai jembatan penghubung pihak swasta maupun masyarakat, yang dimana dengan mempromosikan Daya Tarik Wisata yang dikelola Swasta dan yang belum dikelola dapat menarik minat para pengusaha

untuk menjadi investor dalam mengelola Daya Tarik Wisata. Begitupun juga dengan mempromosikan Daya Tarik Wisata yang belum dikelola, maka akan dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke tempat tersebut.

3) Persoalan Pengelola Daya Tarik Wisata

Kabupaten Mamuju memiliki sekitar 47 Daya Tarik Wisata yang tersebar di 20 Kecamatan. Menurut bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata, dari tahun 2015 sampai tahun 2017 Daya Tarik Wisata unggulan yang terus dikembangkan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju adalah Pulau Karampuang, Permandian So'do, Air Terjun Tamasapi dan Rumah Adat Mamuju.

Menurut bapak Muh. Radi, S.IP selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mamuju hal ini terjadi dikarenakan kebanyakan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Mamuju adalah milik masyarakat setempat dan tidak ada satupun masyarakat sampai saat ini yang ingin bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata yang mereka miliki, contoh misalkan Pantai Lombang-lombang yang dikelola oleh pihak orang perorang (masyarakat setempat) akibat tidak adanya kesepakatan bersama dalam pembagian hasil retribusi sehingga sampai saat ini tidak berkembang dengan baik. Padahal Pantai

Lombang-lombang memiliki keindahan alam yang cukup terkenal di daerah Kabupaten Mamuju.

Selain karena Daya Tarik Wisata kebanyakan milik masyarakat, adapula tempat Daya Tarik Wisata yang seharusnya dikelola oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata namun dikelola instansi lain misalkan, Pantai Anjungan Manakarra yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) Kabupaten Mamuju yang seharusnya dapat dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju, begitu pula dengan Daya Tarik Wisata Gentungan (Water Bum) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang seharusnya dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju. Menanggapi hal tersebut Menurut bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan agar Pantai Anjungan Manakarra dan Gentungan dapat dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju.

4) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu daerah, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan mempengaruhi proses pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Menurut bapak Muh. Radi, S.IP selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mamuju, kualitas

sumber daya manusia khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dan masyarakat pengelola Daya Tarik Wisata relatif rendah. Lebih Lanjut bapak Muh. Radi, S.IP mengatakan bahwa ketidakmampuan ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju dikarenakan kebanyakan ASN yang ditempatkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju tidak sesuai antara keilmuannya dan bidang dimana ia ditempatkan, kemudian kebanyakan ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju yang memegang jabatan penting adalah sarjana lulusan S1 kebawah sehingga sulit bagi ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju untuk bekerja maksimal saat telah dilantik menduduki suatu jabatannya, hal ini memerlukan proses pelatihan dan pengalaman sampai dapat bekerja secara maksimal.

Selain Sumber Daya Manusia ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bapak Muh. Radi, S.IP selaku Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Mamuju mengatakan SDM masyarakat pengelola Daya Tarik Wisata juga memiliki kualitas yang rendah, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pariwisata bagi kehidupan masyarakat. Lebih lanjut bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata mengatakan bahwa

karena terdapat beberapa desa yang masih baru terbentuk dan kebanyakan masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata tidak bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah karena tidak ingin hasil keuntungannya diambil alih oleh pemerintah daerah, hal ini dapat terlihat dari gerakan Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata yang tidak menyeluruh disetiap desa, padahal jika masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan baik, maka anggaran dapat dialokasikan untuk memperbaiki jalan menuju Daya Tarik Wisatanya, Anggaran dapat dialokasikan untuk membuat sarana dan prasarana untuk menunjang Daya Tarik Wisata yang dikelola masyarakat. Menurut bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata sampai saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pariwisata kepada masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata agar gerakan Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata dapat berjalan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan pariwisata, yaitu mempromosikan Daya Tarik Wisata, melaksanakan Event dan Festival, melaksanakan gerakan kelompok sadar wisata, menjalankan program Desa Wisata, melakukan sosialisasi peningkatan sumber daya manusia baik dilingkungan pemerintah yang terkait maupun masyarakat dan mengupayakan adanya bentuk kerjasama dengan pihak masyarakat pengelola Daya Tarik Wisata.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju adalah faktor pendukung yaitu letak daerah yang strategis dan adanya fasilitas penunjang pariwisata sedangkan faktor penghambat yaitu masalah kebijakan, kurangnya anggaran keuangan, promosi Daya Tarik Wisata yang belum maksimal, pengelolaan Daya Tarik Wisata yang belum serius, sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola Daya Tarik Wisata masih terbatas baik dalam lingkup pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan tidak adanya kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta. Melihat dari faktor-faktor tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju belum serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah perlu untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam hal ini pihak investor untuk menunjang pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju perlu menentukan skala prioritas alokasi anggaran dalam pengembangan Daya Tarik Wisata, mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah kedalam sektor pariwisata sangat kurang.
3. Dalam perekrutan atau penerimaan pegawai , pemerintah daerah perlu memperhatikan kualitas maupun pendidikan yang dimiliki pegawai yang bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju agar kemampuan mereka dalam melaksanakan kerja dilapangan semakin baik dan memiliki inovasi-inovasi baru dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Mamuju.
4. Pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan mitra-mitra pariwisata dalam menunjang pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamuju, contohnya seperti Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI), Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) dan Asosiasi of Indonesia Tour and Travel Agency (ASITA).
5. Pemerintah daerah perlu meningkatkan wawasan masyarakat melalui sosialisasi sadar wisata, pelayanan prima dan sapta pesona.

6. Pemerintah daerah harus menciptakan sarana dan prasarana berciri khas tradisional asli daerah Kabupaten Mamuju dan berstandar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Muhadam L. (2008). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Inu Kencana Syafie. (2015). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

I Gusti Bagus Rai Utama. (2017). *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.

Sondang P. Siagian. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Widjaja. Haw. (2001). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: RajaGrifindo Persada.

Wahab. Salah. (1992). *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Oka A. Yoeti. (1983). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Amiluddin. 2013. *Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo*. Makassar , ripsi FEB Unhas

Andi Meegie Senna. (2014). *Analisis Potensi Pariwisata Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Palopo*. Makassar.

Reski Sirupang Kanuna. (2014). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara*. Makassar.

Arfianti Nur Sa'idah. (2017). *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Lampung.

Tim Penyusun. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal (usulan penelitian) dan Skripsi, Prodi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS*.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mamuju

LAMPIRAN









